

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998 yang ditandai dengan adanya gerakan massa dengan tuntutan agar terjadinya reformasi dalam sistem demokrasi, Indonesia tidak lagi berada pada kerangkeng otoritarianisme penguasa. Hak dan kebebasan masyarakat sipil menyatakan pendapat di muka umum kini terbuka lebar. Reformasi membalikan sistem otoritarianisme Orde Baru dengan memberikan jaminan kebebasan bagi setiap masyarakat sipil. Orde Baru dengan otoritarianismenya tumbang dan kemudian lahirlah era reformasi dengan jaminan kebebasan bagi masyarakat sipil. Era reformasi menegakkan demokrasi di Indonesia sebagai bentuk koreksi terhadap praktik politik pada masa demokrasi terpimpin yang menonjolkan sistem presidensial. Berakhirnya Orde Baru menjadi musim baru bagi Indonesia untuk menata kembali sistem pemerintahan demokrasi ke arah yang lebih baik.

Sejak Orde Baru bergulir, bangsa Indonesia mulai memasuki fase yang baru. Era ini ditandai dengan proses demokratisasi yang berlangsung cepat dan dinamis, masyarakat sipil mengambil bagian secara penuh dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Pengontrolan yang dimaksud supaya adanya keseimbangan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan serentak agar tercapainya integrasi masyarakat sipil dengan pemerintah. Masyarakat sipil tidak lagi menjadi subjek pasif dalam urusan politik tetapi secara proaktif dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Era reformasi lahir dengan tujuan memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis. Nilai-

nilai demokrasi harus mengakar dalam kehidupan berbangsa. Jika selama Orde Baru nilai-nilai demokrasi mengalami penjarahan, maka reformasi membuka kedok kebungkaman itu. Era reformasi menjadi arah yang membalikan sistem demokrasi sentralistik dan otoriter pemerintahan Orde Baru.

Bangkitnya kesadaran masyarakat sipil akan jaminan kebebasan menjadi standar dasar terjadinya reformasi. Kritik masyarakat sipil terhadap struktur ketidakadilan dalam demokrasi bukan berarti suatu upaya anti demokrasi tetapi merupakan aktualisasi kedaulatan rakyat. Kritik atau protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan bersama tidak bisa dipahami secara rancu, bahwa demokrasi tidak baik, melainkan hal ini terjadi karena ada struktur dalam sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pengontrolan dan pengawasan kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah merupakan usaha menjaga demokrasi. Demokrasi tidak boleh jatuh ke tangan pemimpin yang tidak berorientasi pada keadilan. Demokrasi dan fungsi pemerintah ialah menjamin kebaikan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum. Baik itu adil secara politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, jaminan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum menjadi standar hukum yang mesti digunakan secara baik dan benar oleh masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan umum. Salah satu bentuk fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap segala kebijakan pemerintah ialah aksi demonstrasi.

Tujuan utama demonstrasi ialah perubahan yang lebih adil. Dengan demonstrasi masyarakat dengan kesadaran politik yang sama berusaha untuk melempar jauh dan mengutuk situasi bobrok dan busuk pada masa kini dan serentak pada saat yang sama mendambakan masa depan yang gemilang. Hal ini memperlihatkan bahwa demonstrasi lahir atas dasar solidaritas sosial dan politik yang tinggi.

Namun, aksi demonstrasi sebenarnya merupakan langkah terakhir yang harus diambil ketika jalur dialog tidak dapat mencapai konsensus bersama dalam menuntut adanya keadilan bagi masyarakat. Tuntutan akan keadilan merupakan

dasar utama terlaksananya demonstrasi. Demonstrasi dilihat sebagai luapan kekecewaan masyarakat terhadap situasi ketidakadilan di mana ketika jalur dialog tidak dapat mencapai konsensus bersama. Dialog yang tidak mencapai konsensus terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dari dua kelompok yang dalam konteks ini adalah masyarakat dan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian disebut konflik.

Demonstrasi dikatakan sebagai konflik karena demonstrasi merupakan ekspresi adanya perbenturan kepentingan politik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menginginkan perubahan atau keadilan tetapi di sisi lain pemerintah tidak menghendaki terjadinya perubahan. Situasi ini kemudian disebut sebagai struktur atau hubungan ketidakadilan.

Berhadapan dengan struktur ketidakadilan ini, demonstrasi hadir sebagai instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntut pemerintah agar berorientasi pada keadilan. Masyarakat menghendaki agar terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Negara dituntut agar menunjukkan sikap responsif dan akomodatif terhadap segala persoalan ketiadilan yang dialami oleh masyarakat. Dalam sistem demokrasi, usaha menciptakan keadilan adalah tanggung jawab bersama dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bukan sebaliknya pemerintah menutup mata terhadap ide keadilan.

Namun, jika pemerintah tidak menghendaki adanya perubahan seperti yang dihendaki oleh masyarakat, maka jalan satu-satunya yang dipakai ialah paksaan atau kekerasan. Sekalipun disadari bahwa prinsip tanpa kekerasan/*nonviolence* merupakan ide utama dalam menyelesaikan struktur ketidakadilan. Akan tetapi hal ini kemudian menjadi dilema karena tidak mungkin masyarakat membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Oleh karena itu, apabila kekerasan atau paksaan digunakan dalam upaya membongkar struktur ketidakadilan, maka mesti memperhatikan intensitas dan penggunaannya ditarik pada taraf sedemikian rendah. Dengan demikian penggunaan kekerasan atau paksaan dalam membongkar struktur ketidakadilan selalu mengadaikan kematangan etis yang tinggi. Penggunaan kekerasan hanya dipakai sebagai upaya untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah agar mendengarkan tuntutan masyarakat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam sejarah peradabannya tidak bisa menyangkal peran penting aksi demonstrasi terhadap perkembangan demokrasi. Misalnya demonstrasi tahun 1998 yang menjadi catatan penting bagi perubahan arah demokrasi di Indonesia. Aksi demonstrasi dari masyarakat sipil berhasil menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Pemerintahan Soeharto dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi lanjutan dari berhasil tumbang rezim Orde Baru ialah masyarakat tidak lagi mengalami kebungkaman sipil terutama dalam hak menyatakan pendapat di muka umum. Ruang kebebasan terbuka lebar bagi masyarakat. Demonstrasi memulihkan nilai-nilai demokrasi.

Sekalipun demikian, demonstrasi juga memberikan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak hanya diartikan sebagai pengaplikasian hak untuk menyatakan pendapat di muka umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tetapi di satu sisi demonstrasi yang sering terjadi kadang menodai nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi tidak hanya memberikan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi tetapi sebaliknya mencederai nilai demokrasi. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan evaluatif bagi terlaksananya demonstrasi. Beberapa contoh pengaruh negatif dari demonstrasi terhadap demokrasi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni adanya anarkisme, perusakan fasilitas umum, vandalisme, terganggunya stabilitas publik hingga berujung pada kehilangan nyawa dari para demonstran. Tentu saja pada konteks ini, demonstrasi mencederai nilai demokrasi, terutama mengabaikan kebebasan orang lain. Sebab, kebebasan merupakan salah satu nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Oleh karena itu, pada konteks ini, disadari bahwa demonstrasi bersifat ambivalen.

Jalan tengah yang diambil ketika demonstrasi menampilkan wajah ganda ialah menjadikan Pancasila sebagai sumber yang mengandung nilai-nilai yang benar, adil, luhur dan bermartabat dalam mengelolah konflik. Nilai-nilai Pancasila merupakan standar keabsahan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tuntutan akan keadilan dan kesejahteraan dalam Pancasila terutama dalam sila

kelima Pancasila harus menjadi dasar yang harus dihayati dan dihidupi oleh bangsa Indonesia. Baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Demonstrasi mesti menampilkan mentalitas demokratis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Mentalis demonstrasi juga mesti lahir dari kesadaran agar adanya kerja sama untuk mencapai kebaikan bersama dan kemampuan untuk berkomporomi agar tidak menodai nilai demokrasi.

Akhirnya demonstrasi bukanlah kekerasan, bukan pula anarkisme yang dapat mencederai demokrasi. Aksi demonstrasi dilaksanakan demi kepentingan umum dan bukan berdasarkan sentimenal primoridial yang berusaha untuk melegalkan misi politik kelompok tertentu. Demonstrasi merupakan gerakan bersama yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan di mana ketika pemerintah tidak berorientasi pada keadilan. Demonstrasi berfungsi untuk membongkar struktur ketidakadilan yang terjadi dalam sistem demokrasi sekaligus serentak memberikan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Masyarakat Sipil**

Sekali pun demonstrasi merupakan penyampaiaan pendapat di muka umum, masyarakat mesti memahami demonstrasi secara komprehensif. Hal utama yang paling penting dari demonstrasi ialah penyampaian pendapat dalam rupa orasi (dimensi dialogis) dihadapan publik. Segala bentuk aspirasi yang hendak disampaikan kepada pemerintah hendaknya disampaikan dengan baik. Demikian pun halnya dengan usaha untuk mengkritik jalannya sistem pemerintahan. Kritikan yang disampaikan mesti mempertimbangkan etika yang baik dan benar dalam menyampaikan kritik. Hal yang dikritik ialah kinerja kerja dari pemerintah, bukan sebaliknya mengkritik sesuatu yang bersifat personal dari pemerintah. Jika masyarakat memahami dengan baik esensi dari demonstrasi serta makna kritik yang benar maka, demonstrasi akan menjadi wadah yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

### **5.2.2 Bagi Pemerintah**

Pemerintah mesti menjalankan tugasnya dengan baik, terutama mengusahakan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah mesti terbuka terhadap suatu perubahan. Pemerintah harus berorientasi pada ide keadilan dan menanggalkan intere-interese pribadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah harus mampu menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Pemerintah mesti membuka mata terhadap struktur ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian pemerintah mencari solusi yang baik untuk keluar dari situasi ketidakadilan yang sedang terjadi.

Segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat hendak diakomodasi oleh pemerintah dan menjadikannya sebagai prioritas utama yang harus diusahakan. Dalam negara demokrasi, suara rakyat mendapat posisi yang penting. Pemerintah mesti berkerja untuk kepentingan umum. Kiranya jargon demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi standar normatif bagi pemerintah untuk memposisikan rakyat sebagai yang pertama dan utama di balik segala bentuk interese-interese pribadi. Pemerintah harus menunjukkan sikap yang lebih responsif dan akomodatif terhadap segala tuntutan masyarakat akan keadilan, kesejahteraan dan berbagai kepentingan umum lainnya.

### **5.2.3 Bagi Para Aktivis**

Mesti diakui juga bahwa para aktivis memiliki peran yang penting dalam mengontrol jalan pemerintahan. Para aktivis bisa juga disebut sebagai penjaga gerbang demokrasi agar tidak dimasuki oleh arus yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi pun tak jarang terjadi karena para aktivis menjalankan fungsi dan peran kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah dengan baik. Para aktivis membaca dan menganalisis situasi politik yang terjadi dan kemudian menilainya secara objektif. Oleh karena itu, bagi para aktivis demonstrasi mesti dijaga dengan baik agar tidak dipolitisasi oleh kepentingan kelompok tertentu yang kemudian menodai nilai-nilai demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### DOKUMEN DAN KAMUS

- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum*. Bab I, Pasal 1.
- Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998*. Bab I, Pasal 19.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Bab I, pasal 2.
- Tim Pandon Media. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. Pandon Media Nusantara: Jakarta Barat, 2014.

### BUKU

- A. Prasetyantoko dan Ignatius Wahyu Indriyo. *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2001.
- Alam, Wawan Tunggal. *Demi Bangsaku Pertentangan Sukarno vs Hatta*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Andi, Hamzah. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998*. Jakarta: Renika Cipta, 2000.
- Baghi, Felix. ed. *Kewarganegaraan Demokratis*. Maumere: Ledalero, 2009.
- . *Redeskripsi dan Ironi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Bertens, Kees. *Sketsa-Sketsa Moral 50 Esai tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Datus, Acry Deo. *Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Deni, Aji. *Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2016.
- Dewantara, Agustinus W. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Distiana, Emita. *Masa Reformasi*. Pontianak: Derwati Press, 2018.

- Fatimena, Reza A.A. *Filsafat sebagai Revolusi Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- .Demokratisasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kanisius. 2018.
- Hatta, Muhammad dkk. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Ismadi, Janu. *Demokrasi Tiang Negara*. Tangerang: Delta Edukasi Prima, 2019.
- Ja, Denny dan Tim, *Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2018.
- Jehalut, Ferdi. *Paradok Demokrasi*. Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020.
- Juniantara, Dadang. *Merentas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ketchum, Richard M. *Buku Pintar Demokrasi Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penguin Books, 2006.
- Keladu ,Yosef. *Partisipasi Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- . Reaktualisasi Pancasila*, tanpa tahun. tanpa penerbit
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- . Berfilsafat dalam Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- . Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- . Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1995.
- . Etika Abad kedua puluh*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- . Berebut Jiwa Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Muftisany, Hafid. *Boleh tidak Demonstrasi dalam Islam?*. Jakarta: Intera, 2021.
- Mulyadi, Muhammad. *Falsifikasi Demokrasi*. Jakarta: Obor, 2019.
- Najib, Muhammad. *Jalan Demokrasi*. Jakarta: Republika, 2019.
- Nuryany, Novia. *Mengapa Harus Demo?*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

- Power, Tomas dan Eve Warbuton. ed. *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?.* Jakarta: Gramedia, 2021.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sangaji, Yuherisman. *Sila Keadilan Sosial dan Penerapannya.* Jakarta: CV Putra Nugraha. 2003
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia.* Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Snijders, Adelbert. *Manusia: Paradoks dan Seruan.* Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat.* Jakarta: Gramedia, 2001.
- Sularto, St. dan D. Rini Yunarti. *Konflik di Balik Proklamasi.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi.* Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Suparo, Basuki Agus. *Jatuhnya Soeharto.* Jakarta: Buku Kompas, 2012.
- Tamara, Nasir, ed. *Demokrasi di Era Digital.* Jakarta: Obor, 2021.
- Tanuredjo, Budiman. *Pasung Kebebasan menelisik Kelahiran UU Demonstrasi.* Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
- Taopan, M. *Demokrasi Pancasila.* Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Wibisana, Teddy, Nanang Pujalaksana, dan Rahadi T. Wiratama, *ALDERA, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1998.* Jakarta: Buku Kompas, 2022.
- Wuli, Rofinus Neto. *Filsafat Perdamaian Eric Weil.* Jakarta: Buku Kompas, 2020.

#### **ARTIKEL DALAM BUKU**

- Bartolomeus Samho, “Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, *Pancasila Kekuatan Pembebasan.* Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Bolo, Andreas Doweng, “Nilai Filosofis Sila II: Persatuan Indonesia”, dalam dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, *Pancasila Kekuatan Pembebasan.* Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Daven, Mathias. “Prolog”, dalam Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-Bukan.* Maumere: Ledalero, 2016.

Djunatan, Stephanus. “Nilai Filosofis Sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dalam Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Gunadha, Ida Bagus “Hindu: dari Arthasastra menuju Demokrasi Indonesia”, dalam S.P. Lili Tjahjadi, *Agama dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Magnis-Suseno, Franz. “Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya”, dalam Ae Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

Daven, Mathias. “Korupsi dan Demokrasi”. *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

Intizar, Raidah, Andini Hamdi, Rahmad Fitriani, “Suara Perlawanan: Bagaimana Mahasiswa menggunakan Pembangkangan Sipil pada Demonstrasi Tolak BBM di Indonesia”. *Jurnal of Communication Sciences*, 5: 2, April 2023.

Kleden, Paul Budi. “Pemilu 2009 dan Upayah Demokratisasi”, *Jurnal Ledalero*, 7:2, Desember 2008.

Pranadji, Tri. “Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penangannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia”, *Pusat Penelitian Agro Ekonomi*, 26: 2, Desember 2008.

Rahman, Muhammad Gazali. “Unjuk Rasa versus Menghujat”, *Jurnal Studia Islamika*, 12:2, Desember 2015.

#### **ARTIKEL DALAM MAJALAH**

Fatah, R. Eep Saefulloh. “Demonstrasi, Gerakan Masa dan Demokratisasi”, *Majalah Prisma* April. 1994: 1

Gultom, Suryadi Radjo dan Samuel. “Orde Baru dan Mitos Gerakan Mahasiswa”, *Majalah Prisma*, 39:2. 2020.

#### **BAHAN KULIAH**

Daven, Mathias “Filsafat Pancasila”, *Manuskrip*. Maumere: STFK Ledalero, 2016.

Keladu, Yosef “Filsafat Barat Kuno”, *Manuskrip*. Maumere: STFK Ledalero, 2016.

## INTERNET

Handayani, Nur Afitria Cika. “Sederet Aksi Demo Mahasiswa Besar-besaran di Era Jokowi, UU KPK hingga Presiden 3 Periode”, dalam *Suara. Com*, 11 April 2022, <https://www.suara.com/news/2022/04/11/161101/sederet-aksi-demo-mahasiswa-besar-besaran-di-era-jokowi-uu-kpk-hingga-presiden-3periode/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

Merdeka. Com, “Sejarah Demonstrasi, dari Awal hingga yang Terbesar”, <<https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-demonstrasi-dari-awal-hingga-yang-terbesar.htm/>>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

Siswanto, “Demo Warnai Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi.” *Suara. Com*, 21 Oktober 2020, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-54474443/>>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

Suhartini, Edeh. “Sebuah Catatan Hari Buruh”, dikutip dari <<https://unida.ac.id/post/detail/sebuah-catatan-hari-buruh-may-day-olehdr-hj-ende-h-suhartini-sh-mh/>>, diakses pada 02 Mei 2023.

Wikipedia. “Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika–Amerika (1955-1968) dikutip dari” <[https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan\\_Hak-Hak\\_Sipil\\_Afrika\\_Amerika\\_%281955-1968%29//](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Hak-Hak_Sipil_Afrika_Amerika_%281955-1968%29//>)>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024.